

GERAKAN SOSIAL POLITIK MASYARAKAT BLAMBANGAN TERHADAP KOMPENI DI BLAMBANGAN TAHUN 1767-1768

SOCIO-POLITICS MOVEMENT OF BLAMBANGAN SOCIETY AGAINST KOMPENI IN BLAMBANGAN (1767-1768)

Nurmaria

Pascasarjana Ilmu Sejarah UNPAD
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor
e-mail: maria.nur54@yahoo.com

Naskah Diterima: 8 Mei 2017

Naskah Direvisi: 26 September 2017

Naskah Disetujui: 22 November 2107

Abstrak

Kajian ini membahas tentang gerakan sosial politik di Blambangan pada masa Pemerintahan Kolonial. Sekarang, Blambangan dikenal dengan Kabupaten Banyuwangi. Letaknya strategis, perbatasan antara pulau Jawa dan pulau Bali, sehingga sering terjadi konflik. Salah satu konflik tersebut berupa gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis terhadap Pemerintah Kompeni pada tahun 1767-1768. Melalui penggunaan metode sejarah, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji munculnya, intensitas dan akibat gerakan sosial politik tersebut. Berbagai perspektif mengenai gerakan ini dibangun dengan memanfaatkan sumber-sumber VOC, babad dan kajian historis mengenai Blambangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, gerakan sosial politik di Blambangan terjadi karena adanya beberapa alasan, dari segi politik, sosial, etnis, agama maupun ekonomi. Gerakan tersebut sebenarnya tidak pernah berakhir, bahkan ketika pemimpin gerakan tersebut (Wilis) dibunuh oleh Kompeni, para pengikutnya masih melanjutkannya. Akhirnya, Kompeni melakukan berbagai strategi baik kompromi dengan pemimpin gerakan, mendatangkan pasukan perang dari Jawa dan Madura maupun melakukan gencatan senjata untuk menghentikannya.

Kata kunci: gerakan sosial, Wong Agung Wilis, VOC, Blambangan.

Abstract

This research will discuss about the socio-political movement that took place in Blambangan during the colonial period. Today, Blambangan is known as Banyuwangi Regency. It is a border area between the island of Java and the island of Bali. Because of this strategic location it makes the area often happened conflict. One of the conflicts was a social-political movement by Wong Agung Wilis against the Government of the Company in 1767-1768. Through the historical methods, this paper aims is to examine the emergence of social political movements in Blambangan and the achievements that achieved from the socio-political movement. Various perspectives on the movement were built on the use of VOC sources, chapters and several historical studies on Blambangan. Based on research conducted, the social political movement in Blambangan occurred due to several reasons, both in terms of political, social, ethnic, religious and economic. The socio-political movement in Blambangan actually never ended, even when the leader of the movement (Wilis) was killed by the Kompeni, His followers continued the movement. Until the end, the Company undertook various strategies either compromising with the movement's leaders, bringing in war troops from Java and Madura as well as conducting a ceasefire to stop it.

Keywords: social movement, Wong Agung Wilis, VOC, Blambangan.

A. PENDAHULUAN

Kajian yang menyuarakan tentang gerakan sosial di Indonesia memang banyak dihasilkan. Akan tetapi kajian yang secara spesifik membahas gerakan sosial yang terjadi di Blambangan belum ada. Artikel ini berusaha untuk menelaah peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis terhadap Kompeni pada tahun 1767-1768 dari sudut pandang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah upaya untuk mengubah keadaan atau melawan ketidakadilan (Fadhilah, 2006: 1). Terdapat beberapa jenis gerakan sosial, misalnya millenarianisme, messianisme dan lain sebagainya. Millenarianisme biasanya membayangkan kedatangan zaman emas yang akan menghilangkan semua ketidakadilan, kekacauan, pertentangan, dan penderitaan. Sedangkan, messianisme mengharapkan juru selamat, yaitu tokoh yang diyakini akan membawa masa adil dan makmur (Kartodirdjo, 1973: 8-11).

Dari berbagai jenis gerakan sosial tersebut, perlawanan yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis merupakan salah satu gerakan millenarianisme. Membebaskan masyarakat Blambangan dari belenggu Kompeni menjadi motif utama berlangsungnya gerakan sosial tersebut. Meskipun gerakan sosial tersebut berlangsung dalam waktu singkat, namun telah menimbulkan dampak yang luas. Baik bagi masyarakat setempat, maupun bagi Kolonial Belanda, bahkan bagi daerah sekitar Blambangan, misalnya Bali. Oleh karena itu perlu diadakan kajian sejarah yang lebih mendalam, karena sejak awal abad ke-20 hingga saat ini belum ada kajian yang membahas secara khusus dalam bentuk sejarah lokal yang bersifat analitis.

Upaya-upaya penulisan sejarah lokal di Banyuwangi sudah muncul pada abad ke-20. Produk pertama historiografi lokal tersebut berupa buku yang berjudul *Selayang Pandang Blambangan*, terbit tahun 1977. Selain berhasil menerbitkan buku, tim tersebut juga mengusulkan hari

jadi Banyuwangi (*Bali Post*, 19 November 1993).

Pada tahun 1987, bupati Banyuwangi kembali membentuk tim baru, untuk mengkaji ulang rekomendasi tanggal hari jadi dari tim pertama. Tim baru tersebut dipimpin oleh Mas Soepranoto. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, tim ini mengusulkan tanggal 7 Desember 1773 sebagai hari jadi Banyuwangi, alasannya, berlangsung pengangkatan Mas Alit sebagai bupati Banyuwangi yang pertama.

Tentu saja usulan tersebut mendapat penolakan keras dari tim pertama, sampai terjadi perdebatan panjang dan belum ada keputusan atas hari jadi Banyuwangi. Sampai pada tahun 1991, Bupati Banyuwangi kembali membentuk tim baru dan membubarkan tim-tim sebelumnya. Tim ini dipimpin oleh Sekwilda, Widodo Pribadi. Akan tetapi, tim baru ini tidak melahirkan rekomendasi apa pun. Hingga muncul sebuah buku yang ditulis oleh budayawan lokal, Sri Adi Oetomo, yang berjudul "*Menelusuri dan Mencari Hari Jadi Kota Banyuwangi*". Penulis ini mengusulkan dua alternatif tanggal hari jadi. Pertama, 7 Desember 1773, berarti sepakat dengan tim kedua. Selanjutnya, tanggal 2 Februari 1774 saat pelantikan Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi.

Meluasnya pandangan-pandangan baru mengenai hari jadi Banyuwangi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan seminar yang khusus membahas hal tersebut. Beberapa kali seminar diadakan oleh Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Banyuwangi dengan mengundang sejarawan lokal, sejarawan dari Jawa Timur, budayawan, kelompok pejuang 1945, bahkan mendatangkan arkeolog dari Yogyakarta, Abdul Choliq Nawawi. Arkeolog tersebut mengusulkan 24 April 1477 sebagai hari jadi Banyuwangi.

Pada akhirnya, tahun 1993 diadakan kembali seminar yang khusus membahas hari jadi Banyuwangi, dengan

agenda mengkaji ulang lima usulan tanggal yang pernah muncul pada penelitian sebelumnya. Seminar merekomendasikan 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi. Tidak lama setelah seminar tersebut berlangsung, muncullah SK DPRD mengenai penetapan hari jadi Banyuwangi (Margana, dalam *Lembaran Kebudayaan*, 2012²⁴: 23-25).

Seminar tersebut juga melahirkan nama tiga orang yang kemudian diusulkan menjadi pahlawan Banyuwangi, yaitu Wong Agung Wilis, Rempeg Jagapati, dan Sayu Wiwit. Terbitnya buku "*Nagari Tawon Madu*" yang berisi tentang keadaan politik di Blambangan pada abad ke-18 semakin menguatkan upaya tersebut, bahkan kelompok-kelompok yang awalnya bersikukuh dengan pendapat masing-masing, melebur jadi satu mendukung pengusulan nama pahlawan Banyuwangi (Sujana, 2001). Akan tetapi usulan ketiga nama tersebut ditolak, "karena belum ada riwayat perjuangan lengkap yang disusun dalam bentuk kajian akademis, sehingga sumber yang digunakan hanya berdasarkan babad dan sedikit sumber VOC".¹ Margana dalam artikelnya yang berjudul *Melukis Tiga Roh: Stigmatisasi dan Kebangkitan Historiografi Lokal di Banyuwangi*, juga menyepakati hal tersebut, dengan mengatakan bahwa "belum pernah dilakukan kajian akademis terhadap tiga tokoh tersebut, setidaknya hingga tesis I Made Sujana tahun 1995" (*Lembaran Kebudayaan*, 2012²⁴: 8-9).

Pada tahun 2012, disertasi S. Margana diterbitkan, dari disertasi ini terungkap gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa heroik yang terjadi pada paruh ke-2 abad ke-18 yang menjadi titik perdebatan hari jadi dan juga tokoh-tokoh sejarah yang diajukan sebagai pahlawan. Dengan menggunakan data naskah dan sumber VOC, Margana seolah mampu menghidupkan tokoh yang selama ini dianggap fiktif. Misalnya, Wong Agung

Wilis dijelaskan sebagai adik dari Pangeran Pati dan diangkat sebagai patih, namun kemudian dipecat karena adanya polemik politik yang terjadi di kalangan istana. Sedangkan Rempeg, berdasarkan sumber lokal dikenal sebagai Jagapati, seorang pemuda yang mempunyai titisan dari Wong Agung Wilis dan melanjutkan perjuangannya. Selanjutnya, Sayu Wiwit adalah putri dari Wong Agung Wilis yang melakukan pemberontakan di Blambangan bagian barat dan kemudian bergabung dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Rempek Jagapati namun akhirnya tertangkap oleh VOC (2012: 14-20).

Dari beberapa kajian historis yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari pihak pemerintahan daerah, sejarawan, budayawan dan masyarakat umum, belum ada kajian yang secara spesifik membahas tentang gerakan sosial politik di Blambangan yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis terhadap Kompeni Belanda. Oleh karena itu perlu diadakan penelusuran lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Bahkan berdasarkan sumber VOC, perlawanan yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis sangat berbahaya jika dibandingkan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Rempeg Jagapati dan Sayu Wiwit, karena mengurus banyak tenaga dan membutuhkan banyak biaya untuk menumpasnya. Intensitas perlawanannya juga berlangsung sengit, bahkan ketika Wong Agung Wilis sudah diasingkan ke Banda, mampu kembali ke Bali dalam keadaan selamat (Lekkerkerker, 1923: 37). Hal tersebut menimbulkan rasa penasaran yang mendalam, sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat topik ini untuk diteliti.

Beberapa sejarawan juga mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perlawanan Wilis. Seperti I Made Sujana, memandang perlawanan Wilis sebagai reaksi politik terhadap observasi VOC di Blambangan, dan mengungkap tokoh sebagai panglima perang, adanya polemik politik sebagai pemicu perlawanan tersebut. Akan tetapi,

¹ Wawancara dengan Nina Herlina Lubis, Tim Pengusulan Pahlawan Banyuwangi, Bandung, 3 Februari 2017.

dalam disertasi Margana muncul kesan berbeda, yaitu dengan menghadirkan faktor sosial dan religi sebagai benih-benih perlawanan tersebut. Adapun pentingnya topik ini diangkat kembali adalah untuk melihat perlawanan Wong Agung Wilis dari sudut pandang gerakan sosial-politik. Sehingga dapat memunculkan kesan berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.

Hal lain yang menarik dari fenomena sejarah Blambangan pada abad ke-18 ini adalah tentang gerakan masyarakatnya dalam upaya membangkitkan historiografi lokal. Kemunculan kajian ilmiah, seperti karya I Made Sujana dan Sri Margana, turut serta dalam upaya membangkitkan aktivitas penelusuran sejarah lokal dan artefak-artefak peninggalan sejarah. Misalnya, dengan membangun monumen di tempat bersejarah, memburu dan mencari makam ketiga tokoh tersebut dan juga mevisualisasikan ketiga tokoh dalam bentuk lukisan (Margana, dalam *Lembaran Kebudayaan*, 2012²⁴: 7). Tidak berhenti pada makam dan lukisan, usaha masyarakat Banyuwangi semakin melambung dengan menerbitkan buku biografi tiga tokoh tersebut, melalui kerja sama dengan sejarawan dan budayawan lokal.²

Apa yang dipaparkan di atas menimbulkan beberapa pertanyaan, sehingga penulis tertarik untuk mencari penjelasan (eksplanasi) tentang peristiwa tersebut dan menuangkannya dalam sebuah artikel yang berjudul "Gerakan Sosial-Politik Masyarakat Blambangan Terhadap Kompeni di Blambangan Tahun 1767-1768". Lingkup geografisnya adalah Blambangan, yang saat ini berada di

Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, tahun 1767 adalah tahun ketika gerakan sosial terjadi dan diakhiri tahun 1768 setelah VOC berhasil melumpuhkan gerakan sosial-politik yang dipimpin oleh Wong Agung Wilis. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab adalah sebagai berikut:

1. Mengapa muncul gerakan sosial-politik di Blambangan?
2. Bagaimana intensitas jalannya gerakan sosial-politik tersebut?
3. Apa saja akibat dari gerakan sosial-politik bagi Blambangan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Melalui metode sejarah, tulisan ini diharapkan mampu menampilkan suatu rekonstruksi sejarah dengan tingkat objektivitas semaksimal mungkin. Metode sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1957: 34; Kosim, 1984: 36; Gottschalk, 1985: 32; Renier, 1997: 113; Lubis, 2015: 15).

Heuristik sebagai tahap pertama dalam metode sejarah adalah kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau. Sumber-sumber yang dihimpun mengacu pada tiga jenis sumber, yakni sumber tertulis, lisan, benda (Garraghan, 1957: 103; Gottschalk, 1985: 35-40; Renier, 1997: 104; Kuntowijoyo, 2013: 73-76; Lubis, 2015: 7). Sumber-sumber tertulis dapat berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, artikel sezaman, tradisi lisan baik tertulis maupun lisan, buku, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, artikel yang dimuat dalam jurnal atau surat kabar. Sumber-sumber berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, artikel sezaman dapat ditelusuri di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

² Basri. H (ed), *Pangeran Jagapati, Wong Agung Wilis, Sayu Wiwit (Tiga Pejuang Dari Blambangan)*, (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2006); Sundoro (dkk), *Pangeran Rempeg Jagapati Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan Di Tanah Blambangan Tahun 1771*, (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2008)

di Jakarta, dan melalui akses online pada situs KITLV.

Tahap kedua adalah kritik baik secara internal maupun eksternal. Kritik sering disebut juga verifikasi (Kuntowijoyo, 2013: 77; Lubis, 2015: 25). Kritik harus dilakukan agar penulis tidak menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber tersebut (Sjamsuddin, 2012: 103). Dalam tahap ini, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, meneliti otentisitas sumber atau keaslian sumber disebut kritik eksternal. Kedua, meneliti kredibilitas sumber yang disebut kritik internal (Kuntowijoyo, 2013: 77-78). Kritik eksternal dilakukan untuk mencegah sejarawan menggunakan sumber palsu atau menipu. Sementara dalam kritik internal hanya dapat dilakukan terhadap penulisan yang ada dalam dokumen-dokumen atau pada inskripsi pada monumen, mata uang, medali, atau stempel (Renier, 1997: 116).

Setelah sumber-sumber tersebut dikritik, sumber tersebut harus dikoroborasikan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain sehingga melahirkan sebuah fakta sejarah yang mendekati kebenaran. Tidak hanya berhenti sampai di sana fakta tersebut tidak dapat berbicara sendiri tanpa adanya sentuhan dari penulis kecuali pada sumber yang tidak ada kontradiksi atau dikenal dengan sebutan *argumentum ex silentio* (Garraghan, 1957: 294; Gottschalk, 1985: 116; Lubis, 2015: 34-35).

Tahap ketiga ini disebut interpretasi yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sintesis dan analisis. Interpretasi sering disebut biangnya subjektivitas karena dalam proses ini masuk pemikiran-pemikiran penulis atas suatu fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut dirangkai menjadi suatu rentetan tak terputus dari suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah subjektivitas itu diakui namun subjektivitas itu harus dihindari (Ankersmit, 1987: 331; Kuntowijoyo, 2013: 78). Interpretasi merupakan sebuah tahapan yang cukup sulit karena penulis harus bersikap netral terhadap sumber

yang ada. Oleh karena itu, penulis harus mengambil jarak dengan sumber agar tidak terlalu dekat dan menimbulkan bias. Dalam kedua cara tersebut ada berbagai jenis interpretasi, mulai dari interpretasi verbal, teknis, logis, psikologis, dan faktual (Garraghan, 1957: 321-337; Lubis, 2015: 36-39).

Tahap keempat adalah penulisan yang disebut historiografi yang merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah (Gottschalk, 1985: 32; Lubis, 2015: 55). Dalam tahap ini yang diperlukan adalah kemampuan menulis. Sebuah tulisan yang kreatif tentu membutuhkan kecerdasan dan imajinasi. Kecerdasan di sini berarti bersikap kritis pada setiap sumber disertai dengan analisis yang tajam. Imajinasi di sini berarti penulis harus mampu membayangkan bagaimana sebuah peristiwa terjadi sehingga menghasilkan sebuah historiografi yang baik.

Sedangkan untuk menjelaskan permasalahan dalam kasus yang diteliti ini digunakan teori dari Neil J. Smelser, yang dikenal sebagai teori *collective behaviour*. Adapun yang dimaksud dengan *collective behaviour* adalah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sebagai contoh, beberapa kegiatan yang termasuk dalam perilaku kolektif adalah kerja bakti, gotong-royong, demonstrasi, pemberontakan, dan revolusi. Menurut Smelser, ada enam determinan yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah gerakan sosial (Smelser, 1969: 15-17) :

1. *Structural conduciveness*.
2. *Structural strain*.
3. *Growth and spread of generalized belief*.
4. *The precipitating factor*.
5. *Mobilization of participant for action*.
6. *The operation of sosial control*.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Blambangan Periode Awal

Blambangan adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Blambangan didirikan dan berkembang bersamaan dengan Kerajaan Hindu terbesar di Jawa, Majapahit.

Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, dengan dibantu oleh Arya Wiraraja. Arya Wiraraja adalah seorang senopati Madura yang berkedudukan di Sumenep. Atas jasanya dan kesetiaannya kepada Majapahit, pada tahun 1309, Raden Jayanegara yang merupakan putra dari Raden Wijaya, memberi hadiah kepada Arya Wiraraja sebuah wilayah Kerajaan Majapahit bagian timur. Di dalam kajiannya yang berjudul *Beknopte Geschiedenish van Indonesie tot aan de komst der Hollanders*, Ennen mengatakan bahwa, “*De Koning bedacht zijn getrouwe helpers van vroeger goed. Wiraradja werd aangesteld als bestuurder van Loemadjang, het latere Rijk van Blambangan*”³ (Ennen, 1930: 64). Di wilayah itulah Kerajaan Blambangan didirikan dan berkembang hingga abad ke-18 (Lekkerkerker, 1923: 1032-1033; Nugroho, 2011: 139; Ricklefs, 2011: 26; Margana, 2012: 25; Rush, 2013: 2).

Kerajaan Blambangan memang sudah berdiri sejak kekuasaan Majapahit. Akan tetapi, puncak kejayaannya dialami ketika masa pemerintahan Pangeran Tawang Alun II, yaitu pada tahun 1665-1691. Berdasarkan sumber babad dan sumber kolonial, kekuasaan dinasti Tawang Alun berawal pada abad ke-17, dengan ditandai adanya ibu kota baru Blambangan yang terletak di Kedawung (Puger, Kabupaten Jember sekarang). Raja yang berkuasa adalah Tampa Una dan mempunyai gelar Pangeran Tawang Alun I (Arifin, 1995: 105; Lekkerkerker, 1923: 1045). Babad Tawang Alun menyebutkan, dia mempunyai lima anak; dua putra, yaitu Mas Kembar (Tawang Alun) dan Mas Wila, dan tiga putri, yaitu Mas Ayu Tunjungsari, Mas Ayu Melok dan Mas Ayu Gringsing. Putra pertamanya, Mas Kembar akan menggantikannya sebagai raja kelak ketika Tampa Una sudah meninggal, sedangkan putra kedua, Mas

Wila akan mendampingi kakaknya selama bertahta sebagai patih (Arifin, 1995: 105).

Sumber Babad Tawang Alun serta berbagai kajian historis menyebutkan bahwa pada tahun 1665, Pangeran Tawang Alun II naik takhta, menggantikan ayahnya, dan Wila diangkat sebagai patih. Pangeran Tawang Alun II memerintah Blambangan selama 4 tahun, kemudian takhta diserahkan kepada Wila. Menurut Babad Blambangan, penyerahan takhta terhadap adiknya dilakukan, karena Pangeran Tawang Alun II mendengar desas-desus yang tidak menyenangkan mengenai pemberontakan yang akan dilakukan untuk menggulingkan jabatannya. Satu-satunya upaya untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, maka ia menyerahkan takhta tersebut kepada adiknya. Akan tetapi, Wikkerman menyebutkan bahwa sudah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Wila. Dua sumber ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan bertentangan, keduanya menyatakan bahwa terjadi perselisihan antara Wila dan Pangeran Tawang Alun II. Fakta mengenai perselisihan tersebut masih berupa desas-desus atau sudah terjadi pemberontakan, belum ada sumber yang menjelaskan namun informasi yang bisa diterima adalah Pangeran Tawang Alun II memutuskan untuk melepaskan takhtanya (Wikkerman dalam Lekkerkerker, 1923: 1041; Pigeaud, 1929 :100; Arifin, 1995: 105; Sujana, 2001: 28; Margana, 2012: 35).

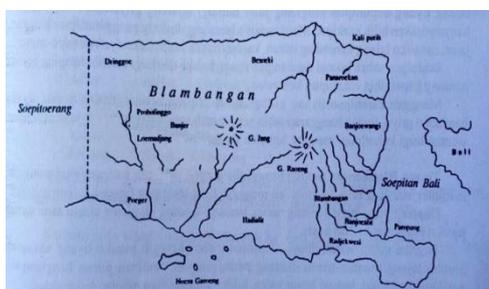
Tidak lama setelah turun takhta, Tawang Alun pergi untuk mengasingkan diri di hutan rimba Bayu. Di tempat ini Tawang Alun membuka pemukiman baru. Lambat laun pemukiman tersebut menjadi ramai, karena penduduk dari Blambangan berduyun-duyun pindah ke Bayu. Selama enam tahun penduduk Bayu semakin banyak jumlahnya. Keadaan ini membuat Wila cemburu, dan marah karena sebagian besar penduduknya memilih untuk pindah ke Bayu. Akhirnya, Wila memutuskan untuk melakukan penyerangan dan pengepungan atas Bayu. Akan tetapi, Wila

³ Raja berfikir bahwa pengikut yang setia harus diperlakukan dengan baik. Wiraraja diangkat menjadi pemimpin Lumajang, kemudian Kerajaan Blambangan.

mengalami kekalahan, dan terbunuh (Brandes, dalam Margana, 2012: 35).

Kejadian tersebut membawa Tawang Alun menjadi satu-satunya penguasa Blambangan dan berhasil membawa Blambangan menjadi kerajaan yang berdaulat (Lekkerkerker, 1923: 1045-1046). Sekitar tahun 1676, Tawang Alun memutuskan untuk membebaskan diri dari Mataram dengan cara menghentikan pemberian upeti serta kunjungan tahunan ke Mataram. Kemudian memakai gelar Susuhunan Blambangan. Dari kumpulan naskah VOC yang disusun ulang oleh De Jonge, tulisan yang cukup jelas dari Brandes mengenai babad Blambangan, kajian Wikkerman yang ditulis berdasarkan keterangan penduduk lokal, karangan Krom mengenai peninggalan-peninggalan kuno dari Kerajaan Blambangan, serta kajian-kajian historis yang dilakukan sejarawan Indonesia, misalnya I Made Sujana, Sri Margana, Edi Burhan Arifin, Moch Hadi Sundoro dan kajian filologi yang dilakukan oleh Danusaprapta, Winarsih Arifin, dapat diketahui bahwa pada zaman Pangeran Tawang Alun II, daerah-daerah yang ada di bawah pengaruh kekuasaan Blambangan sangat luas.

Daerah-daerah pengaruh kekuasaan Blambangan, meliputi hampir seluruh Ujung Timur Jawa, yaitu dari Malang, Probolinggo, hingga Banyuwangi.



Peta 1 Wilayah Kerajaan Blambangan Pada Masa Tawangalun II

Sumber: Diolah dari Babad Wilis.

Berdasarkan ilustrasi peta di atas, selama mengalami *golden age*, terdapat 7 daerah di bawah kekuasaan Blambangan.

Negara daerah yang merupakan bagian dari Kerajaan Blambangan, yaitu: Malang, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Luasnya daerah pengaruh kekuasaan Blambangan di Ujung Timur Jawa, dikuatkan oleh pernyataan Vlekke bahwa "Blambangan di ujung timur pulau Jawa itu yang masih bebas dari dominasi Mataram. Penyerangan Mataram atas Blambangan berkali-kali gagal karena konflik Mataram dengan VOC" (Vlekke, 2008: 145-146). Dari pernyataan Vlekke tersebut, dapat kita ketahui bahwa sampai kira-kira akhir abad XVII, Blambangan masih menguasai hampir seluruh Ujung Timur Jawa. Tahun 1691 Tawang Alun meninggal karena sakit. Babad Tawang Alun menyebutkan, jasadnya dikremasi dan akhirnya mengalami moksa di Keraton Macan Putih (Arifin, 1995: 280).

Babad Blambangan menjelaskan bahwa setelah kematian Tawang Alun, Sasranagara, salah satu anak Tawang Alun, menobatkan dirinya sendiri menjadi raja tanpa melakukan perundingan dengan keluarganya. Anak Tawang Alun yang lain, Macanapura, tidak menerima keputusan sepihak yang diambil oleh Sasranagara. Macanapura melakukan pemberontakan dan berhasil menduduki takhta. Setelah memerintah selama enam tahun, terjadi perebutan kekuasaan lagi. Peperangan sengit terjadi antara Pangeran Macanapura melawan Mas Purba. Mas Purba ialah putra Sasranagara, usianya sekitar 13 tahun, namun berani memberontak karena dukungan dari ibunya yang meminta bantuan Bali. Mas Purba berhasil menang, sehingga kekuasaan mutlak menjadi miliknya dan dia dinobatkan sebagai Raja Blambangan dengan julukan Pangeran Adipati Danureja (Arifin, 1995: 281-282). Tahun 1736 ia meninggal. Mengenai jasadnya juga masih misterius, sumber VOC mengatakan jasad Danureja dibakar dengan sembilan orang istrinya menurut adat istiadat Blambangan, dan dijuluki Dewa Nyurga oleh orang Bali (Leckerkerker, 1923: 1040). Akan tetapi

Babad Tawang Alun mengatakan, jasad Danureja dimakamkan di Tuban (Arifin, 1995:109).

Kematian Danureja pada tahun 1736 menjadikan Mas Sepuh naik takhta menjadi pangeran. Akan tetapi, salah satu sumber menyebutkan bahwa usianya masih terlalu muda (13 tahun) untuk memimpin sebuah kerajaan. Karena usianya masih terlalu dini untuk memegang takhta, diangkatlah Ranggalasata, seorang Bali dari Klungkung, untuk mengatur administrasi kerajaan (Lekkerkerker, 1939: 1050). Berdasarkan kajiannya mengenai Babad Tawangalun, Pigeaud juga mengatakan bahwa Ranggalasata dikirim ke Blambangan dari Klungkung untuk memelihara ketertiban dan mengambil alih kewajiban Danuningrat untuk sementara waktu (Pigeaud, 1929: 341). Pada tahun 1745, Danuningrat mulai mengendalikan kekuasaannya sendiri.

Kajian I Made Sujana menyebutkan bahwa Kerajaan Blambangan mengalami zaman *kertayuga* atau ketenangan, bebas dari konflik fisik di bawah pemerintahan Danuningrat (Sujana, 2001: 35). Hal ini dikuatkan oleh Lekkerkerker dengan menyatakan bahwa “Sekarang terjadi ketenangan di daerah yang tadinya sering diancam bahaya perang” (Lekkerkerker, 1923: 1051). Berikut gambaran mengenai wilayah kekuasaan Pangeran Danuningrat selama pemerintahannya.



Peta 2. Wilayah Blambangan Tahun 1736-1763

Sumber: Diolah dari *Babad Wilis, Babad Tawangalun, Nagari Tawon Madu*.

Peta di atas adalah ilustrasi kekuasaan Blambangan ketika pemerintahan Danuningrat, yang meliputi:

- | | |
|----------------|---------------|
| a. Nusa Barung | i. Ulupampang |
| b. Puger | j. Rogojampi |
| c. Tomogoro | k. Genteng |
| d. Bayu | l. Banyuwangi |
| e. Songggon | m. Gambiran |
| f. Macan Putih | n. Pakis |
| g. Panarukan | o. Ketapang |
| h. Grajakan | |

Selain mampu mempertahankan wilayah kekuasaan yang luasnya tidak mengalami perubahan. Adanya perkiraan jumlah penduduk pada tahun 1750 yang ditulis oleh Pieter semakin memperkuat keadaan Blambangan pada masa pemerintahan Danuningrat. Pieter menyebutkan bahwa terdapat sekitar 20.000 orang penduduk Blambangan (Pieter, 1939: 40). Akan tetapi tidak dijelaskan komponen laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.

Kedamaian pada masa pemerintahan Danuningrat, berakhir pada tahun 1763. Penjelasaannya dapat ditemukan dalam beberapa babad, misalnya Babad Wilis dan Babad Mas Sepuh, sebagai sumber lokal, sangat gamblang menjelaskan keruntuhan pemerintahan Danuningrat disebabkan oleh adanya konflik internal yang terjadi antara Danuningrat dan Wong Agung Wilis⁴. Konflik tersebut dimulai dari adanya fitnah yang didalangi oleh Tepasana,⁵ yang menurut babad berwatak seperti Durno. Fitnah tersebut bermuara

⁴ Di dalam sumber Babad Blambangan dan Babad Tawang Alun disebutkan bahwa Wong Agung Wilis ketika masih kanak-kanak bernama Mas Sirna dan lahir di Blambangan. Berdasarkan silsilah yang ditemukan, Mas Sirna adalah keturunan dari seorang penguasa Blambangan, Pangeran Danureja, yang memerintah pada tahun 1697. Ibu Mas Sirna adalah seorang selir, yang berasal dari Bali (Arifin, 1995: 109).

⁵ Tepasana adalah aristokrat dari Lumajang, yang muncul sekitar tahun 1760-an, dan menjadi mertua Danuningrat.

pada keputusan Danuningrat untuk memecat Wilis dari jabatannya sebagai patih, dan mengangkat Sutajiwa sebagai penggantinya. Atas kejadian tersebut, Gusti Agung Mengwi mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Wilis untuk menangkap Tepasana dan Sutajiwa di Blambangan. Pertempuran pun terjadi, namun Danuningrat mundur dan berhasil melarikan diri bersama Sutajiwa (Arifin, 1980: 33).

Informasi lain mengenai penyerangan Mengwi terhadap Blambangan dapat ditemukan pada Babad Tawang Alun, selain adanya konflik internal antara Danuningrat dan Wilis, terdapat konflik eksternal yang terjadi di Kerajaan Blambangan, yaitu adanya ambisi Danuningrat yang ingin menjadikan kerajaannya *independent*. Keputusannya untuk membunuh Ranggalasata, utusan Kerajaan Mengwi-Bali, dengan tidak didasari alasan yang logis, membuktikan bahwa ia ingin mewujudkan ambisinya. Atas kejadian tersebut, Kerajaan Mengwi mengundang Danuningrat untuk menghadap ke Mengwi sebanyak dua kali, namun undangan tersebut diabaikan, kemudian Mengwi memutuskan untuk menyerang Blambangan (Arifin, 1995: 14-21).

Berdasarkan sumber babad dan sumber kolonial yang sudah dikaji oleh Margana, ia menyebutkan bahwa selama meninggalkan istana Blambangan, Danuningrat meminta bantuan kepada Kompeni untuk merebut kembali Kerajaan Blambangan dari Mengwi dengan membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut:

“Danuningrat berjanji untuk mengirim 600 *koyan* beras, sepuluh pikul lilin dan empat pikul sarang burung. Dalam keadaan damai, jumlah itu akan ditingkatkan. Dia juga meminta Kompeni untuk mendirikan sebuah benteng militer di Blambangan guna mencegah invasi Bali di masa depan. Dia bahkan menjanjikan untuk menyediakan bahan-bahan yang

dibutuhkan sekaligus pekerjanya untuk membangun benteng tersebut” (Margana, 2012: 45)⁶.

Margana juga menegaskan bahwa surat perjanjian tersebut ditulis langsung oleh Danuningrat. Kemudian Hendrik Breton, *Gezaghebber* dari Surabaya segera mengirimkan proposal tawaran pengajuan kerja sama tersebut kepada VOC. Adanya tawaran kerja sama yang dilakukan oleh Danuningrat juga dibenarkan oleh De Jonge. Ia mengatakan bahwa, “Pangeran Patti lebih suka menyerahkan daerahnya kepada Kompeni, daripada daerahnya itu tetap berada dibawah kekuasaannya orang Bali, yang selalu berpura-pura baik dan selalu membantu rakyat Blambangan” (De Jonge, 1923: 3).

Akan tetapi, respons dari Batavia dan Semarang tidak sesuai dengan ekspektasi Danuningrat dan Hendrik Breton. Gubernur di Batavia secara terang-terangan menolak tawaran kerja sama yang diajukan oleh Danuningrat. De Jonge mengungkapkan penolakan kerja sama tersebut dalam kajiannya dengan menyatakan bahwa:

“Daerah bagian selatan sudut Timur Jawa benar telah diserahkan pada kompeni, akan tetapi mereka yang menyerahkannya tidak pernah berkuasa sungguh-sungguh atas daerah tersebut, dan mereka yang sementara memegang kekuasaan di daerah itu, telah menolak untuk tunduk dan patuh”.⁷

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa gubernur menganggap daerah Ujung Timur Jawa, termasuk Blambangan, sudah menjadi wilayah kekuasaan Kompeni. Sehingga Kompeni

⁶ Informasi berdasarkan NA, Koleksi Engelhard 19a, Proposal tentang Blambangan oleh Hendrik Breton, Surabaya 30 Oktober 1763, hlm. 152.

⁷ “*De Oosthoek was haar wel afgestaan, maar zij die dien afstand deden hadden er geen gesag nitgeoefend, en zij die er het gezag in hadden hadden weigerden zich te onderwerpen*” (De Jonge, 1923: 1).

tidak perlu mengadakan perjanjian dan kesepakatan apa pun dengan Danuningrat. Akan tetapi, meskipun Kompeni merasa memiliki Blambangan sejak dikeluarkannya Perjanjian Giyanti oleh Mataram, hingga tahun 1764 Kompeni belum begitu memperhatikan daerah tersebut. Wilayah timur yang diperhatikan oleh Kompeni baru melampaui Pasuruan.

Atas penolakan tersebut, Danuningrat merasa kecewa dan selanjutnya mengajukan bantuan kepada Kartanegara, Bupati Lumajang. Berdasarkan Babad Wilis, Gusti Agung Mengwi mendengar kabar keberadaan Danuningrat di Lumajang, maka dengan segera diutuslah beberapa duta dari Blambangan dan Bali untuk membujuk Danuningrat kembali ke Blambangan. Danuningrat mau kembali ke Blambangan, kemudian bersama dengan Wilis, ia menghadap Gusti Agung Mengwi.

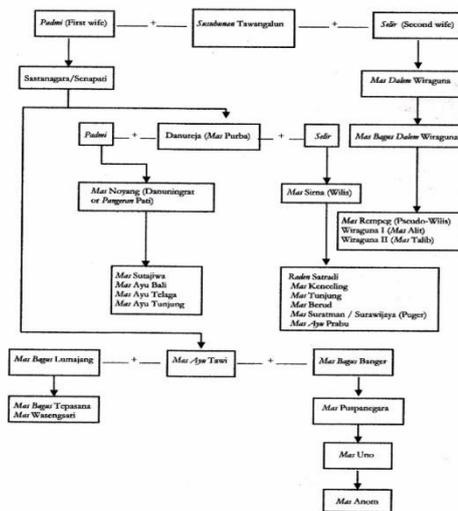
Babad Mas Sepuh mengemukakan bahwa setibanya di Bali, Danuningrat tidak bertemu dengan Gusti Agung Mengwi. Gusti Agung Mengwi memerintahkan dia untuk tinggal di sebuah desa terpencil dan sudah lama tidak berpenghuni. Kemungkinan, perintah ini adalah sebuah hukuman yang diberikan oleh Gusti Agung Mengwi kepada Danuningrat, yang mana Danuningrat belum menyadarinya dan bahkan dengan suka rela membangun desa tersebut serta mendirikan puri Tanah Ayu, untuk beribadah. Mengetahui hal ini, Gusti Agung Mengwi menjadi sangat marah dan memerintahkan rakyatnya untuk tidak melakukan aktivitas apa pun ke desa tempat Danuningrat dan keluarganya tinggal (Arifin, 1995: 128). Hal ini dilakukan supaya Danuningrat mengalami kesulitan memperoleh makanan dan meninggal pelan-pelan.

Babad Mas Sepuh juga memberikan informasi bahwa ada salah satu bangsawan Bali, yang bernama Gusti Agung Kamasan Dhimandhe yang diam-diam memberi makanan Danuningrat beserta keluarganya. Mengetahui hal ini, Gusti Agung Mengwi memutuskan untuk

mengusir Danuningrat dari desa itu dan pindah ke Desa Seseh. Dari perintah kedua ini, Danuningrat baru menyadari maksud Gusti Agung Mengwi yang sesungguhnya, bahwa ia menginginkan kematiannya. Setelah sampai di desa Seseh, Danuningrat diserang oleh penduduk dan prajurit yang dikirim oleh Gusti Agung Mengwi. Danuningrat dan pengikutnya kalah, semuanya mati di pantai Seseh.

Penjelasan dari Babad Wilis mengatakan bahwa setibanya di Bali, Danuningrat yang berpakaian serba putih bertemu dengan Gusti Agung Mengwi dan sempat membuat beberapa pengakuan. Pengakuan Danuningrat mengenai peristiwa pemecatan Wilis dan pembunuhan Ranggalasata serta keputusan untuk meninggalkan kerajaan membuat Gusti Agung Mengwi terkejut dan tidak bisa menahan amarahnya. Gusti Agung Mengwi kemudian memutuskan untuk menahan Danuningrat dan menyuruh dia tinggal di Seseh. Mendengar berita ini, Nawangsari, istri Danuningrat, dan anak-anaknya menyusul ke Seseh. Setelah tiba di Seseh, Danuningrat dibunuh oleh pasukan Mengwi. Sementara istri dan anak-anak Danuningrat kembali ke Blambangan (Arifin, 1980: 37).

Walaupun sumber-sumber yang mengkisahkan kematian Danuningrat tergolong dalam jenis sastra, namun tidaklah mustahil pula bahwa sumber-sumber tersebut masih menyimpan peristiwa sejarah dari masa lampau. Karya Lekkerkerker juga mengulas sedikit kisah tentang kematian Danuningrat oleh orang Bali (Lekkerkerker, 1923: 1041). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa peristiwa kematian Danuningrat pada tahun 1763 menandakan bahwa berakhirnya eksistensi Dinasti Tawang Alun yang telah berkuasa lebih dari seratus tahun lamanya di Kerajaan Blambangan. Berikut bagan mengenai pohon keluarga keturunan Tawang Alun:



Gambar 1. Pohon Keluarga Blambangan
Sumber: Babad Blambangan.

Setelah Danuningrat meninggal, Blambangan sepenuhnya dikuasai oleh Kerajaan Mengwi. Gusti Agung Mengwi menunjuk Gusti Ketut Kaba-Kaba dan Gusti Kuta Beda untuk memimpin Blambangan. Berdasarkan kajian Margana, dua pemimpin ini membentuk Blambangan menjadi kota perdagangan dengan membiarkan para pedagang lokal dan asing mengunjungi Blambangan (Margana, 2012: 48).

2. Penyebab Terjadinya Gerakan Sosial Politik Blambangan

Ada beberapa penyebab terjadinya gerakan sosial-politik yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis terhadap Kompeni. Bermula ketika adanya laporan seorang mata-mata pribumi yang diutus oleh VOC, menyatakan bahwa pada bulan Agustus 1766 terdapat tiga kapal besar Inggris yang membawa para pelaut Bugis dan Madura tiba di Blambangan, di bawah komando Edward Coles, anggota *English East India Company* (VOC 3186, 1766: 673-677). Kedatangan EIC ke Blambangan bertujuan untuk memasarkan senjata, opium, kapas, dan kain yang harganya relatif murah. Sedangkan pedagang lokal menawarkan beras, garam, hewan ternak, dan kayu. Sehingga hubungan dagangnya bersifat barter. Keadaan ini membuat Blambangan

menjadi kota yang ramai dan pelabuhannya sering dikunjungi para pedagang, misalnya dari Cina, Bugis, Mandar, Melayu, dan lain-lain. Blambangan menjadi tidak kondusif.

Kejadian tersebut mendorong VOC untuk menguasai Blambangan karena apabila dibiarkan dapat mengganggu eksistensi VOC di Pulau Jawa. Berkuasanya VOC di Blambangan menjadi sebab awal terjadinya gerakan sosial-politik di Blambangan.

Berdasarkan informasi dari surat dinas Kapten Blanke yang dikirim ke Gubernur Johannes Vos di Batavia, pada akhir Maret 1767, bendera Belanda berhasil dikibarkan untuk pertama kalinya di Blambangan (VOC 3215, 1767: 131-136). Gusti Ketut Kaba-Kaba dan Gusti Kuta Beda berhasil disingkirkan dari Blambangan. Kejadian ini merupakan pertempuran awal yang terjadi antara masyarakat Blambangan terhadap VOC dalam memperebutkan kekuasaan politik di Blambangan. Sampai pada akhirnya meluas ke berbagai faktor dan mengkristal, kemudian bermuara pada berlangsungnya gerakan sosial politik.

Faktor politik, Kompeni menunjuk Mas Anom dan Mas Uno untuk menjadi pemimpin baru di Blambangan. Selain itu dari faktor religi, paksaan untuk memeluk Agama Islam sekaligus Kristen mulai terjadi di masyarakat Blambangan. Misalnya dengan menikahkan Raja Blambangan dengan anggota elite Islam dari wilayah Mataram yang didukung oleh Belanda. Tentu saja hal tersebut memicu munculnya pertentangan dari penduduk lokal, yang memang sejak awal memeluk agama Hindu (Lekkerkerker, 1923: 1060).

Faktor ekonomi, VOC mulai dengan semangat perdagangan yang kemudian bermuara pada nafsu monopoli. Berawal pada tahun 1699, Belanda mengenalkan komoditas perkebunan pada Blambangan. Bibit-bibit kopi, teh, tebu, dibawa ke daerah tersebut (Yahmadi, 2000: 180). Lahirnya perkebunan mendatangkan penderitaan baru bagi

rakyat Blambangan. Rakyat Blambangan hidup tertekan baik secara sosial maupun ekonomi. VOC memerintahkan rakyat untuk membuat jalan-jalan dan membabat pepohonan di hutan untuk ditanami tanaman perkebunan. Akan tetapi VOC tidak menyediakan makanan bagi rakyat yang bekerja dalam kondisi kelaparan dan kekurangan serta kesengsaraan penyakit (Arifin, 1995: 93). Keberhasilan berdagang melalui monopoli ini, kemudian digunakan VOC untuk memanjakan penguasa lokal dengan kenyamanan ekonomi, utamanya untuk berperang meluaskan kekuasaan menghadapi musuhnya. Cara ini menciptakan jurang pemisah antara kehidupan penguasa dan rakyat. Sehingga muncullah konflik sosial di masyarakat.

Bukan hanya tenaga yang diperas, tapi demi kepentingan VOC, para penguasa beroperasi ke pelosok-pelosok kampung untuk menyita semua beras simpanan dan hasil panen, serta bahan makanan lainnya dan mengangkutnya. Apabila tidak dapat diangkut, VOC menyuruh membakarnya, kemudian menyuruh rakyat menanam padi kembali dengan perintah yang sangat memaksa. Setelah panen, jerih payah penduduk disita lagi (Arifin, 1995: 12).

Pemerintahan Kompeni di Blambangan berjalan selama kurang lebih enam bulan, kemudian setelah itu muncul situasi yang tidak kondusif, karena rakyat Blambangan merasa tertekan dengan besarnya pajak dan kerja wajib yang harus dilakukan untuk Kompeni. Menurut Babad Wilis, "Lima puluh orang setiap hari diwajibkan masuk kerja untuk Kompeni dan menyerahkan lembu dan sapi".

Kejadian-kejadian inilah yang mengkristalkan dan mendorong tumbuhnya kekuatan-kekuatan rakyat yang sudah lemah untuk bersatu mengadakan gerakan sosial yang kuat dalam rangka menumbangkan kekuatan VOC. Terjadilah gerakan sosial politik besar-besaran pada tanggal 18 Februari 1768 yang dipimpin oleh Wong Agung Wilis.

3. Intensitas Gerakan Sosial Politik

Kesan baik di mata masyarakat menjadi modal utama bagi Wilis untuk menghimpun massa dan memperoleh dukungan dari daerah lain. Menurut Babad Wilis, langkah pertama yang dilakukan oleh Wilis adalah mempengaruhi penduduk untuk tidak melaksanakan kerja wajib dalam pembangunan benteng Kompeni (Arifin, 1980: 31). Langkah selanjutnya dapat dilihat berdasarkan informasi dari surat Gubernur Vos, yang mengatakan bahwa Wilis melakukan perjalanan mengelilingi daerah dan membagi-bagikan uang Bali dan senjata-senjata buatan Inggris (De Jonge, 1923: 12). Sepertinya dua langkah ini merupakan cara Wilis untuk mengambil hati rakyat dan berusaha menjauhkan rakyat dari Kompeni. Berdasarkan kajian Margana, ia mengatakan bahwa Wilis juga mencari dukungan dari para diaspora seperti Bugis, Sumbawa, Melayu dan Cina (Margana, 2012: 115). Berdasarkan laporan dari Vos kepada Gubernur Jenderal dan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Desember 1767, pasukan yang berhasil dikumpulkan oleh Wilis, adalah sekitar 6000 orang. Vos juga mengatakan bahwa:

"Yang pasti adalah di Kotalateng terdapat sekelompok manusia pungutan. Di situ terdapat orang Bali, Bugis, Mandar, Melayu, Punakawan (yaitu yang lahir campuran antara Bali dan Blambangan), Cina dan bahkan juga Inggris" (Vos kepada Gubernur Jenderal dan Dewan Komisaris, 20 Desember 1767).⁸

Kutipan tersebut di atas, menjelaskan bahwa pasukan yang dihimpun oleh Wilis berasal dari orang-orang Bali, Bugis, Mandar, Melayu, Punakawan (yaitu yang lahir campuran

⁸*Zeker was te Cotta een zonderling zamenraapsel bijeen. Men telde er Balinezen, Boeginezen, Mandarezen, Maleijers, Panakawangs (uit de vermenging van Baliers met Baloemboangers geboren), Chinezen, en zelfs Engelschen* (Vos aan Gouvern. Gen. en Rade, 20 December 1767).

antara Bali dan Blambangan), Cina, dan bahkan juga Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Wilis menjadi orang yang mempunyai kedudukan penting di Blambangan. Terlepas bergabungnya mereka menjadi pasukan Wilis karena terpaksa atau tidak, seperti yang dikatakan oleh Vos, namun dengan adanya jumlah pasukan tersebut sudah membuktikan bahwa Wilis mampu menjadi seorang pemimpin.

Mendengar kabar bahwa Wilis membentuk pasukan dan akan melakukan gerakan sosial politik untuk merebut Blambangan dari Kompeni, Van Rijcke⁹ memutuskan untuk mengunjungi dan mengadakan perundingan dengan Wilis di Kutalateg. Kunjungan tersebut dimaksudkan agar Wilis mau mendukung pemerintahan Kompeni di Blambangan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Wilis tidak menjanjikan apa pun kepada Kompeni, ia hanya mengatakan akan berkunjung ke Banyualit pada hari ketiga bulan Februari (Margana, 2012: 125). Namun pada kenyataannya, Wilis tidak pernah melakukan kunjungan ke Banyualit, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara Wilis dan Kompeni di Blambangan sepanjang tahun 1768.

Menurut laporan dari Rijcke kepada Gubernur Vos, pada tanggal 18 Februari 1768 Wilis melakukan serangan pertamanya. Serangan ini difokuskan untuk merebut benteng Kompeni di Ulupampang. Kapten Maurer, Skipper Pietersz, Letnan Diest, dan Letnan Wipperman bersama pasukannya menghadapi Wilis dan pasukannya. Pertempuran ini terjadi pada musim hujan, sehingga Kompeni merasa kewalahan menghadapi Wilis dan sekutunya. Senjata api tidak bisa digunakan secara total, pasukan Kompeni mundur teratur ke Pagon, sebuah pedesaan Islam dekat kota, dan membakar perkampungan di

sekitarnya. Rijcke melaporkan terdapat 150 orang pasukan Wilis tewas, sedangkan pasukan Kompeni yang gugur di medan perang tidak disebutkan jumlahnya. Pada pertempuran pertama ini, pasukan Kompeni dinyatakan kalah, ratusan pasukan Wilis yang bergerak di bawah komando Encik Kamis berhasil mengambil alih benteng Kompeni di Ulupampang dan memenggal beberapa mata-mata Kompeni di Ulupampang (VOC 3248: folio 9-16). Wilis berada pada puncak kejayaan untuk sementara waktu, Mas Anom dan Mas Weka, bupati Blambangan yang ditunjuk oleh Kompeni, menyatakan bergabung dengan Wilis. Posisinya di kota semakin kuat karena dukungan datang silih berganti. Selain menguasai Ulupampang, pasukan Wilis juga ditugaskan untuk mengkondisikan daerah sekitar Banyualit supaya pihak Kompeni kekurangan pasokan makanan di bentengnya sendiri.

Dalam surat dinas Gubernur Vos yang diolah oleh De Jonge dijelaskan kondisi Van Rijcke dan pasukannya di Benteng Banyualit semakin mengenaskan. Pasukannya menderita kelaparan dan penyakit mematikan, bahkan dirinya sendiri juga terserang penyakit. Rijcke mengirim surat kepada Vos, menceritakan keadaannya dan memohon pengiriman bantuan. Bantuan dikirim oleh Vos pada tanggal 24 April 1768, di bawah komando *Gezaghebber* Coop a Groen dengan membawa 2000 prajurit menuju Banyualit. Bahkan Vos rela pindah ke Surabaya untuk memantau perkembangan Blambangan. Setelah pasukan sampai di Banyualit, Vos memerintahkan untuk menyusun strategi merebut Ulupampang kembali sebelum menyerang Kotalateg, tempat Wilis berada (De Jonge, 1923^{xi}: 13).

Berdasarkan kajian Lekkerkerker, pada tanggal 14 Mei 1768 *Gezaghebber* Coop a Groen melancarkan serangannya ke Ulupampang. Di sana pasukan Kompeni mendapat serangan yang sangat hebat di bawah pimpinan Encik Kamis. Akan tetapi, akhirnya Ulupampang dapat ditundukkan. Para pasukan Wilis di

⁹ Van Rijcke adalah panglima perang Kompeni yang di tunjuk oleh Gubernur Jenderal dan ditempatkan di Benteng Banyualit.

jadikan tawanan. Pasukan yang menyerah dikirim ke Semarang. Namun Encik Kamis berhasil melarikan diri, meskipun dalam keadaan terluka (Lekkerkerker, 1923: 1052).

Sasaran selanjutnya setelah menguasai Ulupampang, *Gezaghebber* Coop a Groen merencanakan penyerangan tanggal 18 Mei 1768 ke Kotalateng. Akan tetapi, belum sampai penyerangan dilakukan, Kompeni mendapat serangan terlebih dahulu dari pasukan Wilis. Tidak banyak prajurit Kompeni yang terluka dan tewas dalam serangan dadakan tersebut. Sehingga Kompeni tetap melanjutkan serangannya ke Kotalateng, petahanan Wilis sangat kuat dengan pasukannya yang berjumlah 6000 orang. Kompeni tidak mungkin bisa menembus istana (Lekkerkerker, 1923: 1052).

Berdasarkan laporan dari *Gezaghebber* Coop a Groen terhadap Gubernur Vos, tiba-tiba terjadi pengkhianatan dari pasukan Wilis. Sutanagara dan 2000 orang pasukannya menyerang Wilis dari belakang. Pengkhianatan ini membuat pertahanan kocar-kacir dan semakin lemah, istana terkepung. Pada tanggal 18 Mei 1768, *Gezaghebber* Coop a Groen berhasil mendobrak benteng Wilis, Kotalateng dibakar dan sisa-sisa bangunan istana digunakan untuk membangun benteng baru untuk pertahanan Kompeni, sekaligus menunjukkan pada rakyat bahwa Kompeni berhasil menguasai Blambangan. Pengkhianatan terhadap Wilis, juga dilakukan oleh Mas Uno dan Mas Anom, yang dengan sengaja memberikan informasi kepada Kompeni mengenai keberadaan Wilis sehingga Kompeni dengan sangat mudah menangkap Wilis (VOC 3248, 18 Mei 1768: folio 13-14). Berdasarkan kajian Lekkerkerker, setelah Wilis tertangkap, maka semua prajurit dan penduduk yang menjadi tawanan dibebaskan dari tahanan dan mendapatkan pengampunan. Wilis, Anom, dan Uno semuanya diangkut sebagai tahanan ke Edam.

Berdasarkan kajian Lekkerkerker, pada tahun 1778, Wilis bersama dengan putra-putranya berhasil melarikan diri dari Banda. Pernyataan tersebut didukung oleh laporan utusan *Gezaghebber* Van der Nieport Semarang yang ditugaskan membeli budak ke Bali. Utusan tersebut melaporkan bahwa Wilis bersama dengan anaknya dan empat orang lainnya, termasuk Mas Bagus Lumajang, Patih Malang dan Antang, Natakusuma berhasil membunuh para pengawal Kompeni, kemudian bertemu dengan seorang pendeta dan berhasil membawa mereka ke Sasak, Bali melalui Buton. Tidak lama setelah Wilis berada di Bali, dia mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jasadnya dimakamkan di Blambangan (VOC 3528, 29 Mei 1778, folio 151-152 dalam Margana, 2012: 153-154).

4. Dampak Gerakan

Setelah Wilis dan pengikutnya berhasil dilumpuhkan, *Gezaghebber* Coop a Groen memutuskan untuk membumihanguskan Kotalateng, sebagai pusat terjadinya gerakan sosial-politik tersebut. Laporan *Gezaghebber* Coop a Groen kepada Vos menjelaskan tentang kebijakan yang diambil pasca terjadinya gerakan. Isi laporan tersebut yaitu:

“Saat ini saya tengah sibuk membangun sebuah benteng kecil untuk menunjukkan pada rakyat Blambangan bahwa kita akan menduduki tempat ini. Kita mencari tempat yang sehat di antara desa-desa kecil dimana kita dapat mengendalikannya. Saya ingin Vaandrig Guttenberger ditempatkan disini sebagai komandan. Saya harap dengan didirikannya benteng kecil ini, beberapa perubahan dapat dilakukan. Saya sendiri telah meruntuhkan seluruh perkampungan di Kotalateng. Saat ini, kita masih disibukkan dengan pembakaran. Saya pikir hal itu akan menyebabkan para penduduk patah semangat jika mereka melihat tidak hanya sebuah benteng kecil dibangun

untuk mengepung mereka, namun mereka juga akan mengerti bahwa Kotalateng telah dibumihanguskan tanpa seorang pun berkesempatan untuk membangunnya lagi” (Surat *Gezaghebber* Coop a Groen pada Gubernur Vos, 25 Mei 1768 dalam Margana, 2012: 131).

Pernyataan *Gezaghebber* Coop a Groen di atas, menunjukkan bahwa gerakan yang dipimpin oleh Wilis berdampak secara nyata dalam hal ekonomi, khususnya terkait dengan sandang, pangan, dan papan masyarakat Blambangan yang dibumihanguskan oleh Kompeni.

Secara mental, masyarakat Blambangan juga dihantam habis-habisan. Kompeni ingin membuat rakyat Blambangan jera dan tidak lagi dapat melakukan gerakan melawan pemerintah. Keamanan diperketat untuk mencegah kemungkinan terjadinya ekor dari gerakan sosial-politik yang dilakukan Wilis. Tindakan tersebut sangat merugikan rakyat Blambangan yang tinggal di Kotalateng. Rakyat yang pro dengan Kompeni, dipersilahkan untuk memulai kehidupan baru di Blambangan, wajib patuh dan tunduk terhadap semua aturan Kompeni. Sedangkan keluarga Wilis dan rakyat biasa yang menjadi pendukung Wilis dan dicurigai menjadi penggerak, ditahan dan ada yang dijadikan budak.

Dampak gerakan tersebut dalam segi politik, terlihat pada pengangkatan Sutanagara menjadi bupati baru Blambangan. Sutanagara dianggap sebagai orang yang loyal terhadap Kompeni dan tidak mempunyai garis keturunan pangeran Blambangan. Ayahnya adalah salah satu orang kepercayaan Danuningrat yang ditugaskan untuk mengurus administrasi istana. Ibunya berasal dari Bali.

Dampak gerakan tersebut juga terjadi pada aspek religi. *Gezaghebber* Pieter Luzac membuat keputusan untuk mengislamkan Blambangan secara keseluruhan. Sutanagara dipaksa memeluk Islam dan mewajibkan rakyat Blambangan

meninggalkan Hindu dan memeluk Islam (De Jonge, 1923^{xi}: 242).

Dampak terhadap aspek etnis dan budaya dibuktikan dengan adanya penggantian elite birokrasi Blambangan, diganti dengan orang-orang Jawa dan beragama Islam. Unsur-unsur Bali, dihilangkan dari Blambangan. Hal tersebut terbukti pada keputusan Luzac untuk tetap menghukum para tawanan yang berasal dari Bali meskipun tawanan tersebut adalah saudara Sutanagara.

D. PENUTUP

Gerakan sosial-politik yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis bertujuan untuk membawa rakyat Blambangan menuju Blambangan yang bebas dari tekanan mana pun. Wong Agung Wilis menginginkan Blambangan lepas dari cengkeraman Bali, Jawa, dan Kolonial Belanda. Penolakan atas tawaran menjadi pangeran Blambangan yang diberikan oleh Gusti Agung Mengwi setelah kematian Danuningrat, menunjukkan bahwa Wilis adalah seorang tokoh yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kerajaannya. Keberadaan Kolonial yang awalnya dianggap sebagai harapan baru yang bisa membawa Blambangan semakin sejahtera, justru sebaliknya. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat bagi Wilis untuk melangsungkan gerakan sosial-politik terhadap Kompeni, meskipun akhirnya gerakan tersebut mengalami kegagalan dan Wilis dapat dilumpuhkan.

DAFTAR SUMBER

1. Arsip

Banyuwangi, 1691-1881: No. 1-6
VOC 3186
VOC 3215, 1767
VOC 3248, 18 Mei 1768
VOC 3528, 29 Mei 1778

2. Tesis, Disertasi dan Jurnal.

Darusaprapta, 1984.

Babad Blambangan: Pembahasan-Suntingan Naskah- Terjemahan.
Disertasi: Yogyakarta: FIB UGM.

- Made Sujana, 1995.
Nagari Blambangan. Tesis: Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya UI.
- Margana, Sri. 2012.
"Melukis Tiga Roh: Stigmatisasi dan Kebangkitan Historiografi Lokal di Banyuwangi". Jurnal. Banyuwangi: Lembaran Kebudayaan Volume 24.
- 3. Buku**
- Ankersmit, F. R. 1987.
Refleksi tentang Sejarah. Jakarta: Gramedia.
- Arifin Burhan, Edi. 2006.
Wong Agung Wilis. Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- Arifin, Winarsih. 1980.
Babad Wilis. Jakarta.
- Fadhillah. 2006.
Gerakan Sosial. Malang: Averroes Press.
- Garraghan, Gilbert J. 1957.
A Guide To Historical Method. New York: Fordham University Press.
- Gottschalk, Louis. 1985.
Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hasan, Ali. 1997.
Sekilas Perang Puputan Bayu. Banyuwangi: Pemda TK II Kabupaten Banyuwangi.
- Kartodirdjo, Sartono, 1978.
Protest Movements in Rural Java. New York: Oxford University Press.
- _____. 1984.
Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- _____. 1993.
Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kosim, E, 1984.
Metode Sejarah: Asas dan Proses. Bandung: Universitas Padjadjaran Fakultas Sastra.
- Kuntowijoyo, 2013.
Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lekkerkerker, C. 1923.
Blambangan, de Indische Gids II. Amsterdam: De Bussy.
- Lubis, Nina, H, 1998.
Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942). Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- _____, 2015.
Metode Sejarah. Jawa Barat: Yayasan Sejarahwan Masyarakat Indonesia.
- Margana, Sri. 2012.
Ujung Timur Jawa 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- P. A, Winarsih. 1995.
Babad Blambangan. Yogyakarta: Bentang.
- Pieter van Dam, 1939.
Beschrijvinge van de Oost-Indische Compagnie III. 's-Gravenhage.
- Pigeaud, TH. 1932.
Aantekeningen Betreffende den Javaanschen Oosthoek. Amsterdam: De Bussy.
- Renier, G. J. 1997.
Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M.C. 2011.
A History of Modern Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rush R, James. 2013.
Jawa Tempo Doeloe: 600 Tahun Bertemu Dunia Barat 1330-1985. Depok. Komunitas Bambu.
- Sjamsuddin, Helius. 2012.
Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Smelser, Neil. J. 1969.
Theory of Collective Behaviour. USA: Collier-Macmillan Canada.
- Sujana, I Made. 2001.
Nagari Tawon Madu, Kuta-Bali. Bali: Larasan Sejarah.
- 4. Surat Kabar**
- Bali Post*, 19 November 1993.